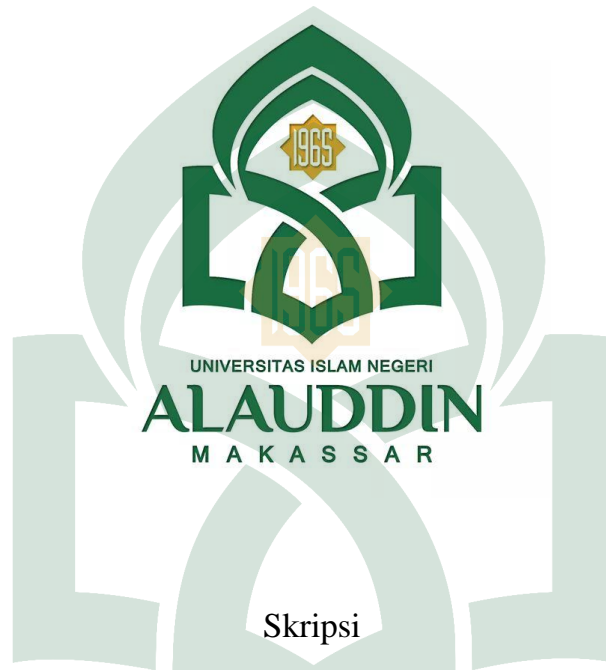


**PERAN BABINKAMTIBMAS DALAM MENCEGAH TERJADINYA
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KECAMATAN CAMBA
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUHAMMAD AKBAR HIDAYAT
NIM: 10300113229

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

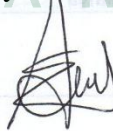
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar Hidayat
NIM : 10300113229
Tempat/ Tgl. Lahir : Makassar, 06 November 1994
Jur/ Prodi/ Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas/ Program : Syariah dan Hukum
Alamat : Jln. Karunrung Raya 2 No 10
Judul : Peran Babinkamtibmas dalam mencegah Tindak Pidana
Pencurian di Kecamatan Camba (Perspektif Hukum Islam). .

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 06 Desember 2017

Penyusun,



Muhammad Akbar Hidayat

NIM: 10300113229

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Peran Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencurian Di Kecamatan Camba (Perspektif Hukum Islam)”, yang disusun oleh **Muhammad Akbar Hidayat, NIM: 10300113229**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.

Gowa, 06 Desember 2017.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.S.I	(.....)
Penguji I	: Dr. Alimuddin, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Subehan Khalik, S.Ag, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Sohrah, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Irfan, S.Ag, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP. 19621016199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu sesuai dengan rencana.

Skripsi dengan judul : **“Peran Babinkamtibmas dalam mencegah Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba (Perspektif Hukum Islam) ”** yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Perjalanan dalam meraih pengetahuan selama ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dengan nilai yang tak terhingga. Ketekunan dan keseriusan senantiasa diiringi do'a telah mengantarkan penulis untuk mendapatkan semestinya, walaupun tidak seutuhnya. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa apa yang diperoleh selama ini adalah perjuangan bersama. Dukungan, semangat dan perhatian yang tulus menjadi dasar semangat baru dalam mengiringi perjalanan penulis untuk menyelesaikan pengembaraan dalam dunia pengetahuan.

Solawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad saw. Nabi yang telah berjuang dan sukses dengan perjuangan tersebut untuk merubah peradaban dan tatanan kehidupan umat manusia dari zaman biadab menuju zaman beradab, dari zaman kegelapan menuju cahaya kehidupan yang hakiki (Islam).

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Drs. Nasruddin dan ibunda Hasdawati yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Selama menempuh studi maupun dalam merampungkan dan menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

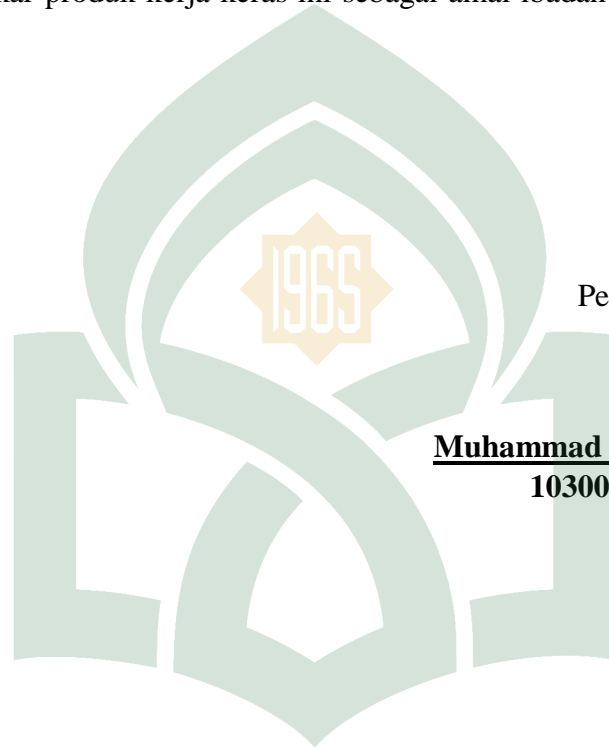
1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M. Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dan Ibu Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Sohrah, M. Ag dan Bapak Irfan, S.Ag..M. Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari membuat proposal hingga rampungannya skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan, dan pelayanan yang layak selama penulis melakukan studi.
6. Bapak Kapolsek Camba A. Alamsyah. S S.H, Babinkamtibmas Bapak Bripka

Akbar Sirajuddin , Bripka Muhammadong yang telah yang telah memberi izin dan berkenan diwawancarai untuk penelitian ini.

7. Kepada sahabat saya Ahmad Aqram Amrullah, S.H, Muhammad Askar, S.H, Riswan Rasyid, S.H, Muh. Yusril Abni, S.H yang memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman kelas Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK E) ,Chaeril Anwar, Muhammad Albar, Muhammad Asdar, Imam Sumantri, Jasman, Aty, Muhammad Yusril, Putri Amaliah, Anni Nur Annisa, Mukasifah Syarif, Muhammad Irsyam, Paramitha Husain, Hikmawati, Asran , Alvin Asgaf , Muhammad Hajar, dan lainnya terima kasih kebersamaannya dalam suka dan duka selama ini.
9. Teman-teman KKN Reguler Tahun 2017 Angkatan 55 Kelurahan Bone, Kecamatan Seger, Kabupaten Pangkep, Muhammad Rizal, Muhammad Toha, Muhammad Adnan, Muhammad Fitrah, Andin Nuraeni, Syafridayani, Syaquila Wardani, Nisrawati, Nurliah Syafruddin, Mustika rahayu, Tiami, Sinarti, terima kasih atas kekeluargaan dan kebersamaannya selama menjalani Kuliah Kerja Nyata.
10. Kumpulan Remaja Lasare Segeri Pangkep Makasih waktu dan kebersamaan pada saat Kuliah Kerja Nyata yang sudah banyak membantu
11. Seluruh pihak yang berkontribusi atas penyelesaian penelitian dan skripsi ini yang tidak mampu disebutkan satu-persatu. Tidak disebutkan bukan berarti mengurangi esensi kalian.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik

yang bersifat konstruktif sangat penulis harapan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuh oleh halayak umum. Semoga Allah swt, selalu menaungi kita sekalian dengan rahmat-Nya dan semoga Allah swt. Akan menilai dan menakar produk kerja keras ini sebagai amal ibadah yang berkelanjutan di sisi-Nya. Amin.



Penulis,

Muhammad Akbar Hidayat
10300113229

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL/ILUSTRASI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-10
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11-38
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Pengertian Pencurian.....	13
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
4. Jenis-Jenis pencurian.....	17
B. Babinkamtibmas	20
1. Pengertian Babinkamtibmas	20
2. Peran Babinkamtibmas	23
3. Fungsi, Tugas pokok, dan Wewenang Babinkamtibmas	25

C. Perspektif Hukum Islam Tentang Pencurian.....	28
1. Pengertian Pencurian.....	28
2. Unsur-Unsur Pencurian.....	30
3. Pembuktian Tindak Pidana Pencurian	33
4. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pencurian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	39-44
A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Instrumen Penelitian.....	42
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45-60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Peran dan Faktor Pendukung Serta Penghambat Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba (perspektif hukum islam)	52
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Ketentuan dan Pelaksanaan Peran Babinkamtibmas dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian	55
BAB V PENUTUP.....	61-62
A. Kesimpulan	61
B. Implikasi Penelitian	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL/ILUSTRASI

Tabel I	Struktur Organisasi Polsek Camba	48
Tabel II	Jumlah Penduduk Kecamatan Camba.....	49
Tabel III	Pencurian Pada tahun 2017.....	50



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengantitik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
Y	Ya		Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	Fathah dan alif atau yaa'	A	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan yaa'	I	i dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	U	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالِ رَوْضَةٌ : *raudah al- atfal*

الْقَاضِيَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*
نَجَّيْنَا : *najjainaa*
الْحَقُّ : *al- haqq*
نُعَم : *nu''ima*
عُدُّو : *'aduwwun*

Jikahuruf ى ber-*tasydiddi* akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari *Al-Qur’an*), al-hamdulillah,

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fizilaal Al-Qur'an

Al-Sunnahqabl al-tadwin

9. *Lafz al- Jalaalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *diinullah* بِالله *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh :

hum fi rahmatillaah

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

contoh:

Wa ma muhammadunillaarasul

Inna awwalabaitinwudi' alinnasilallazii bi bakkatamubarakan

Syahruramadan al-laziiunzilafih al-Qur'a

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanallahuwata'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihiwasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Muhammad Akbar Hidayat

NIM : 10300113229

Judul : Peran Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba (Perspektif Hukum Islam)

Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana peran babinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian di Kecamatan Camba. Pokok masalah tersebut terbagi kedalam beberapa submasalah yaitu: 1) Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba?, 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan dari Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencurian?

Jenis penelitian ini kualitatif lapangan dengan menggunakan metode yuridis empiris dan normatif syar'i. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dengan cara turun langsung ke lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Lalu tehnik pengolahan dan analisis data yang digunakan, yaitu: seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di Kecamatan Camba, pihak Babinkamtibmas mendapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, meliputi: Faktor pendukung yaitu terjalinnya kerjasama yang baik antara Babinkamtibmas dan perangkat pemerintahan Kecamatan Camba untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian di Kecamatan Camba, dan peran serta masyarakat setempat yang ikut menjaga keamanan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian di Kecamatan Camba. Faktor Penghambat yaitu keterbatasan dana serta kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian di Kecamatan Camba, dan Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Babinkamtibmas kepada masyarakat yang ada di Kelurahan dan Desa yang berada di Kecamatan Camba. Dan Peran Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang berdasarkan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat adalah sejalan dengan konsep Hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat setempat. Hanya saja prosesnya yang berbeda, di zaman Rasulullah, sahabat, dan sekarang. Begitupun peran Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di Kecamatan Camba tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Babinkamtibmas di Kecamatan Camba harus menyiapkan strategi untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Camba. Termasuk menerapkan hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana pencurian, 2) Diperlukan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayah Hukum Kecamatan Camba agar tercipta masyarakat yang aman dan damai, serta terhindar dari tindak pidana pencurian yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat kepolisian. Sebagaimana tercantum dalam pasal 13 tentang tugas dari kepolisian.¹ “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun dalam kenyataannya masih banyak di temui aparat kepolisian belum melaksanakan apa yang telah di cantumkan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, terutama penanggulangan kejahatan atau biasa disebut kriminalitas. Salah satunya tindak pidana pencurian. Pencurian adalah pengambilan property orang lain secara tidak sah tanpa seizing pemilik,² Tetapi pencurian pada dasarnya telah diatur didalam KUHAP pasal 362 yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Jika dilihat dari definisi pencurian diatas, maka terdapat beberapa unsur-unsur pencurian diantaranya:

¹ Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002* tentang Kepolisian Indonesia

² Pencurian,” <http://id. Wikipedia.org/wiki/>, akses tanggal 10 juni 2017. Pukul 20.00.

1. Mengambil barang
2. Barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian.
3. Pengambilan barang yang demikian itu harus dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum.³

Moeljatno juga berpendapat masalah pencurian yang terdapat didalam pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang lain. Akan tetapi, maksud untuk memiliki barang dengan cara melawan hukum didalam pasal 362, perbuatan tidak dari hal hal yang lahir, tetapi tergantung pada niat orang yang mengambil barang.⁴ Pencurian juga meliputi benda yang bergerak atau pun benda yang tidak bergerak.

Pada mulanya benda benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam memorie *van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda benda bergerak (*roerend goed*). Benda benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak, ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terdapat benda yang bergerak serta berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan.⁵

Jenis pencurian dan definisi pencurian tidak hanya diatur dalam pasal 362. Akan tetapi, didalam pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian

³ Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), h 60

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), h. 62.

⁵ KUH Perdata pasal. 509.

dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.

Tindak pidana pencurian dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak terjadi, dari zaman dulu sampai sekarang. Namun, setiap perbuatan yang terjadi di suatu wilayah pasti terdapat unsur sebab akibatnya dan hal tersebut juga tidak sama dengan daerah yang lain. Tindak pidana pencurian juga mempunyai efek yang negative bagi masyarakat, terutama di Kecamatan Camba.

Pada era globalisasi ini, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat.

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Babinkamtibmas sebagai institusi yang di percaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola Babinkamtibmas terus di kembangkan, hingga di harapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan Babinkamtibmas lainnya.

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif berupa patroli patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan. Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan

penahanan untuk kemudian hari diserahkan kepada kejaksaan yang meneruskannya ke pengadilan⁶.

Dari semua penjabaran tugas Kepolisian diatas, tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas tanpa batas, di rumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu di lakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur , menjaga, mengawal, dan patroli Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, Hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lain kejahatan di Kec. Camba Kab. Maros belum tentu sama cara dan penyebab yang melatar belakangi bila dibandingkan dengan kejahatan di kota lain.

Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari tentang pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan tersebut. Pengetahuan itupun dikenal dengan nama kriminologi. Seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang pengetahuan kejahatan.

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budaya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat di satu tempat

⁶ Peraturan kapolri No. 1 Tahun 2009 *Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*. Pasal 3

yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya.

Di samping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif dalam mendukung peran Babinkamtibmas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam realita Negara kita yang sebagian besar penduduknya adalah orang muslim maka sangat dibutuhkan suatu sumber dalam membuat hukum yang sumber tersebut tidak lain adalah al-Quran dan hadist. Meskipun demikian teks-teks al-Quran tidak dapat difahami secara fulgar akan tetapi harus secara mendalam. Dengan demikian posisi siyasah syar'iyah sangat besar dalam membuat suatu aturan agar peraturan tersebut dapat terealisasi baik dari segi ritual maupun dari segi sosial kemasyarakatan dalam hal ini berbangsa dan bernegara dengan tujuan mencapai kemaslahatan secara komprehensif.⁷

⁷Catatan akademik.html, *Fiqih siyasah dan ruanglingkupnya, pengertian siyasah dan siyasah syar'iyah, kedudukan fiqih siyasah*, (15 Februari 2017).

Allah berfirman dalam QS. Al-An'am/6 : 82.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai sangat urgen untuk dilakukan penelitian terkait peran Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, untuk lebih terfokusnya pembahasan, maka yang menjadi pokok masalah dalam tuisan adalah: **Bagaimana Peran Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di Kecamatan Camba Di tinjau dari Perspektif Hukum Islam**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada peran Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di Kecamatan Camba Ditinjau dari Perspektif hukum Islam.

2. Deskripsi Fokus

- a. Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).⁹
- b. Babinkamtibmas adalah singkatan dari bintang Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰

⁸Kementrian Agama, Syaamil Al-Quran, (Sygma, 2012), h. 138

⁹Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet, Kelima ,Bandung 1984), h. 735

¹⁰Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

- c. Tindak Pidana Pencurian adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah¹¹,
- d. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan bagian agama islam yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang di akui dan di yakini yang mengikat bagi semua pemeluknya¹²

C. Rumusan Masalah

Setelah diuraikan mengenai latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi obyek pembahasan. yaitu Bagaimana peran Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba Ditinjau dari Perspektif hukum Islam. (Studi Kasus di Kecamatan Camba kab. Maros).

Berdasarkan pokok masalah tersebut maka akan dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan dari Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencurian?

¹¹Isnu Gunadi dan Junedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*(Cet. I:Jakarta:Kencana , 2014), h. 8.

¹²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Cet. XX; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 20.

D. Kajian Pustaka

Agar penulisan karya tulis ilmiah ini sistematis dan memiliki bahan perbandingan, maka di bawah ini penulis memberikan atau mengemukakan beberapa referensi yang relevan dengan masalah dan sekaligus sebagai bahan acuan untuk lebih meningkatkan kualitas isi karya tulis ilmiah ini. Pembahasan tentang judul ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang menjadi rujukan penulis diantaranya:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2009 Tentang Keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang di tandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat
2. **Mahrus Ali**, dalam bukunya **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, diterbitkan di Jakarta tahun 2002 dalam buku ini beliau memaparkan mengenai pengetahuan dan teori dasar hukum pidana yang telah terdapat dalam perundang-undangan khusus, dan peraturan daerah, serta menganalisis hubungan antara bangunan atau asas-asas hukum dalam KUHP dengan asas-asas hukum dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP.
3. **Andi Sofyan**, dalam bukunya **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, diterbitkan di Makassar tahun 2014 dalam buku ini beliau memaparkan Tujuan dari Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) sesuai keputusan menteri kehakiman RI- adalah menjamin

adanya kesatuan pelaksanaan hukum acara Pidana berdasarkan KUHAP, sejak dari proses penyidikan, penuntutan, praperadilan, putusan perkara (Putusan Pengadilan, Upaya hukum, penyitaan, pengeledahan, penangkapan, penahanan, hingga penyelesaian di tingkat (Lembaga) Permasyarakatan.

4. **Edward A. Thabault**, dalam bukunya, **Proactive Police Management**, diterbitkan di Jakarta tahun 2001 dalam buku ini beliau memaparkan Paradigma, perilaku, system operasional, sikap dan tindakan POLRI dipenghujungmilenium III saat ini, bias disamakan dengan kondisi kepolisian amerika serikat tahun 1970-an. Alam keterbukaan dan demokrasi disana telah mendorong begitu cepat perbaikan kepolisian. Secara konseptual tidak kalah jauh dari mereka. Hanya dalam aktualisasinya POLRI lalu tertinggal jauh, karena ditubuh POLRI tertanam kanker ganas yang berakar dalam dan menyebar keseluruhan tubuh, yang kambing hitam utamanya adalah *Mismanagenent*.

Dengan melihat beberapa buku yang dikemukakan di atas tidak satupun membahas tentang “Peran Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di kecamatan camba ditinjau dari Prespektif Hukum Islam.

Namun ada satu dua buku yang menjelaskan tentang Peran Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di kecamatan camba ditinjau dari Prespektif Hukum Islam, tetapi belum Signifikan di dalam mengemukakan tentang hal tersebut karena itu diperlukan penelitian lanjutan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba .
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum islam terhadap Pelaksanaan dari Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencurian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Pencurian Di kecamatan Camba Kab Maros yang dilakukan oleh Babinkamtibmas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang undangan Negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana . Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu dikemukakan oleh beberapa para ahli .

Mulyatno merumuskan:

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Simons pendapat lain:

Merumuskan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²

¹Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 54.

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 75.

Van Hamel adapun :

Merumuskan sebagai serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.³

W. P. J. Pompe adapun :

Merumuskan adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Wirjono Prodjodikoro adapun :

Tindak Pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

H.J. Van Schravendijk adapun :

Merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.

J.E Jonkers adapun :

Merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (Wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

³Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012), h.98

Utrecht adapun :

Merumuskan *strafbaat feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan , maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Kanter dan Sianturi sementara :

Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang(yang mampu bertanggung jawab).⁴

2. Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan *pe* dan akhiran-*an*. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi⁵. Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁶

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin, atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti”Pencuri” berarti orang yang mencari atau

⁴Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1985), h 75

⁵Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 346-347

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 112

maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti” pencurian” proses, cara , perbuatan.⁷

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi; “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak Pidana dapat di bedakan menjadi dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis; dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada

Sudut pandang teoritis menurut Moeljatno, unsur tindak Pidana meliputi :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan)
- c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R. Tresna unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan

⁷ KBBI. Web. Id/curi 17/11/2017 10:37

- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Vos unsur Tindak Pidana meliputi :

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan Pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan

Menurut Jonkers unsure tindak Pidana meliputi :

- a. Perbuatan
- b. Melawan Hukum
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)

Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Undang-undang meliputi :

- a. Unsur tingkah laku

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (handelen), juga dapat di sebut perbuatan materil (materiel feit) dan tingkah laku pasif atau negative (natalen).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkan atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerak-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya mengambil (362) atau memalsu dan membuat secara palsu (268). Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya di rumuskan dengan perbuatan pasif, dan sedikit sekali perbuatan pasif

Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan (natalen), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu di salahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh perbuatan : tidak memberikan pertolongan (531), membiarkan (304)

b. Unsur sifat melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil/formelle *wederrwchtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil/materiel *wederrechtelijk*). Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis. Seringkali sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada kedua-duanya, seperti perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan (338), adalah dilarang baik dalam UU maupun menurut masyarakat.

c. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat obyektif dan dapat bersifat subyektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan (3) tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur keadaan menyertai

Unsur keadaan yang menyertai, adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
- 3) Mengenai obyek tindak pidana
- 4) Mengenai subyek tindak pidana
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.⁸

4. Jenis Jenis pencurian dalam KUHP

Dalam KUHP tindak pidana pencurian dikelompokkan sebagai kejahatan terhadap harta oleh penyusun undang-undang dibuku 2 KUHP yang diatur mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367. Tindak pidana pencurian ini terbagi atas beberapa jenis yakni ,:

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Ed, 1., Cet , - Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002), h. 106

Pasal 362

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama lamanya 5 tahun atau denda sebanyak banyaknya 900 rupiah.

Pencurian dalam pokok ini mengandung unsur objektif dan subyektif

Pasal 363

1) Dengan hukuman penjara selama lamanya 7 tahun, dihukum :

- a. Pencurian hewan,
- b. Pencurian pada waktu kebakaran letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang,
- c. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak,
- d. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang bersekutu,
- e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pasal 364

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari 25 rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 250 rupiah”.

Pasal 365

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3.

Pasal 366

Dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362. 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1-4”.

Pasal 367 ayat 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. 2) Jika dia adalah suami(istri) yang terpisahkan meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. 3) jika menurut lembaga

matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung(sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.⁹

B. Babinkamtibmas

1. Pengertian Babinkamtibmas

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzaisho* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara.¹⁰

⁹ Surodibroto dan sunarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (cet 17, Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 229

¹⁰ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Surabaya: Laksbang, 2009), h. 1

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *”politie”* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya *“Politei Overzee”* sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah *“politei”* mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah¹¹

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum

Tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.¹²

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan sebagai berikut:

¹¹ Sadjjiono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Surabaya: Laksbang, 2009), h. 2

¹² Sadjjiono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Surabaya, Laksbang, 2009), h. 2

1. Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum;
2. Anggota dari badan tersebut diatas.

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.¹³

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu :

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Istilah Kepolisian dalam Undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah

¹³ Sadjjiono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Surabaya, Laksbang, 2009), h. 4

sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat¹⁴

2. Peran Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba

Hukum sebagai norma memiliki suatu kekhususan yakni hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan pihak Babinkamtibmas atau tempat seseorang dalam masyarakat. Polisi republic Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani dan mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah.

Adapun peran kepolisian menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri”.

Babinkamtibmas memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal pencegahan tindak pidana pencurian. Peran babinkamtibmas bagi kehidupan semua

¹⁴ Sadjjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang, 2009), h. 5

masyarakat sangatlah penting. Sebab, masyarakat mempercayakan kepada Babinkamtibmas untuk memberantas berbagai jenis kejahatan khususnya pada kasus pencurian.

Peran babinkamtibmas dalam mencegah Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba:

a. penyampaian ke Masjid-masjid

Maksudnya ialah, rata-rata pencurian yang terjadi di rumah-rumah kosong yang penghuninya melakukan mudik. Maka dari itulah pelaku mengambil kesempatan melakukan tindak kejahatan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut. Pihak Babinkamtibmas menghimbau ke Masjid-masjid dengan melakukan penyampaian jika melaksanakan Mudik, agar masyarakat tidak meninggalkan barang-barang berharganya.

b. Patroli Babinkamtibmas

salah satu cara pencegahan atau cara mempersempit ruang gerak kasus pencurian di Kecamatan Camba yaitu dengan melakukan Patroli. Patrol dilakukan pada malam hari, yang dianggap rawan terjadi kasus pencurian yang dilaksanakan pukul 08:00-12:00. Pelaksanannya dilakukan sesuai dengan jadwal piket yang telah di tentukan.

c. Penyuluhan

Pihak Babinkamtibmas melaksanakan Penyuluhan di Kantor Camat. Pelaksanaanya dilihat dari rawannya Tindak kejahatan yang terjadi dan juga pada saat

ada permintaan dari pihak Kecamatan.¹⁵

Dalam menjalankan salah satu upaya pencegahan pihak Babinkamtibmas. Berdasarkan Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2015 tentang Fungsi Babinkamtibmas, Tugas Pokok babinkamtibmas, Wewenang Babinkamtibmas antara lain sebagai berikut:

Fungsi Babinkamtibmas dalam undang-undang no 3 tahun 2015

Pasal 25

- 1) Babinkamtibmas diangkat berdasarkan keputusan kepala kepolisian Resort(kapolres)
- 2) Babinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas.

Pasal 26

- 1) Melaksanakan kunjungan sambang kepada masyarakat untuk
 - a) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian,
 - b) Memelihara hubungan silaturrhmi/persaudaraan.
- 2) membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia(HAM).
- 3) menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat(harkamtibmas)
- 4) mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat,
- 5) memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan,
- 6) menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif,

¹⁵ Bripka Akbar Sirajuddin, Babinkamtibmas Kecamatan Camba, Wawancara, Camba 27 September 2017

- 7) mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak yang terkait,
- 8) melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan social.

Pasal 27

Tugas pokok babinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi /negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di desa/ kelurahan, Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana di maksud ayat (1) Babinkamtibmas melakukan kegiatan

- a. kunjungan dari rumah kerumah(door to door) pada seluruh wilayah penguasaannya.
- b. melakukan dan membantu pemecahan masalah(problem solving)
- c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- d. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e. kunjungan dari rumah kerumah(door to door) pada seluruh wilayah penguasaannya.
- f. melakukan dan membantu pemecahan masalah(problem solving.
- g. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- h. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- i. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran
- j. ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
- k. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan polri.

Adapun wewenang Babinkamtibmas sebagai berikut:

Pasal 28

Babinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan polmas (polisi masyarakat), berwenang untuk:

- a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas

- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan
- c. Mendatangi tempat kejadian perkara(TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP)
- d. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

Panduan pelaksanaan penyelesaian perselisihan warga masyarakat atau komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 29

Babinkamtibmas memiliki keterampilan:

- a. deteksi dini
- b. komunikasi social
- c. negosiasi dan mediasi
- d. kepemimpinan: dan
- e. pemecahan masalah social

Pasal 30

1. Perlengkapan babinkamtibmas meliputi:

- a. Jas Hujan,
- b. Rompi,
- c. Jaket,
- d. Senter,
- e. ransel Kerja,
- f. Kamera,
- g. computer, modem, dan printer,
- h. Alat Komunikasi (HP, HT, Megaphone/wireless),
- i. brosur kamtibmas,
- j. belangko kunjungan ,
- k. stiker kunjungan,
- l. brosur kamtibmas,
- m. buku agenda,

- n. peta desa / kelurahan,
 - o. garis polisi(police line),
 - p. Alat tulis kantor(ATK) dan
 - q. Alat komunikasi (sepeda motor/sepeda/lain-lain
2. Ketentuan mengenai perlengkapan babinkamtibmas, diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur pembinaan masyarakat badan pemeliharaan

Pasal 31

- 1) Babinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dapat diberikan rumah dinas ,
- 2) Rumah dinas babinkamtibmas merangkap sebagai kantor, yang di lengkapi dengan fasilitas alat komunikasi,
- 3) Pengadaan rumah dinas babinkamtibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sesuaikan dengan ketersediaan anggaran polri.¹⁶

C. Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Pencurian

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a) pencurian yang hukumnya had

- 1. Pencurian ringan (السَّرْقَةُ الصَّغْرَى), dan
- 2. Pencurian berat (السَّرْقَةُ الْكُبْرَى)

b) pencurian yang hukumnya ta'zir

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut.

فَأَمَّا السَّرْقَةُ الصَّغْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَالٍ الْغَيْرِ خُفْيَةً أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

¹⁶Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015* tentang Pemolisian Masyarakat Bagian Kedua.

Artinya:

Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.¹⁷

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut:

أَمَّا السَّرْقَةُ الْكُبْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عُلْسِيْلِ الْمَعَالِبَةِ

Artinya:

Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.¹⁸

Sedangkan antara pencurian ringan dengan berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuan. Sedangkan dalam pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut jarimah hirabah atau perampokan, dan secara khusus akan dibicarakan dalam bab tersendiri. Dimasukkannya perampokan ke dalam kelompok pencurian ini, sebabnya adalah karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

¹⁷ Abd Al-Qadir Audah, al-tasyri' Al-Jinai Al-Islami, Juz II, Dar Al-Kitab Al-‘ Arabi, Beirut, tanpa tahun, h. 514

¹⁸ Abd Al-Qadir Audah, al-tasyri' Al-Jinai Al-Islami, Juz II, h. 514

Pencurian yang hukumannya ta'zir juga dibagi kepada dua bagian sebagai berikut.

- 1) Semuanya jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta anak oleh ayahnya.
- 2) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.¹⁹

2. Unsur-unsur Pencurian

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

1) Pengambilan secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, seperti mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Dengan demikian, apabila pengambilan itu sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut bukan pencurian melainkan perampasan (ikhtilas).

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet III, 2016), h. 82

Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya
- b. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya
- c. Barang yang dicuri dimasukkan kedalam kekuasaan pencuri

2) Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang di curi itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenakan hukuman had. Akan tetapi, imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had.

Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dicuri harus berupa mal muttaqawwin
- b. Barang tersebut harus barang yang bergerak
- c. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan
- d. Barang tersebut mencapai nisab pencurian

3) Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukannya secara diam-diam.

Pemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian ia memindahkan hak milik atas barang tersebut kepada orang lain maka ia tetap dikenai hukuman had, karena pada saat dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi.

4) Adanya niat yang melawan hukum

Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum.

Disamping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk

memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum, oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencuri.²⁰

Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenal hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²¹

3. Pembuktian Tindak Pidana pencurian

Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu dengan saksi, pengakuan, dan sumpah.

a. Dengan saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman. Syarat-syarat saksi

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet III, 2016), h. 83-88.

²¹Kementrian Agama, *Syaamil Al-Quran*, (Sygma, 2012), h. 26

dalam tindak pidana pencurian ini pada umumnya sama dengan syarat-syarat saksi dalam jarimah zina.

Imam abu hanifah menambah persyaratan, yaitu bahwa persaksian tersebut belum kadaluwarsa. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi pengembalian barang yang dicuri atau harganya. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mengakui syarat kadaluwarsa. Dengan demikian, menurut mereka (Selain Hanafiyah) persaksian tetap diterima baik kadaluwarsa maupun tidak.

Disamping itu, Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan untuk diterimanya persaksian, adanya pengaduan atau tuntutan dari orang yang memiliki atau menguasai barang yang di curi. Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal tersebut.

b. Dengan pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti tindak pidana pencurian. Menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'I. Akan tetapi Imam abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.

c. Dengan sumpah

Dikalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah

dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had. Akan tetapi, pendapat yang kuat dikalangan Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian

Menurut pendapat penulis penggunaan sumpah yang dikembalikan (Al-Yamin Al-Mardudah) sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang riskan dan kurang tepat, karena hukuman untuk tindak pidana ini sangat berat sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pembuktiannya.²²

4. Hukuman untuk Tindak Pidana Pencurian

Apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut:

a. Penggantian kerugian (dhaman)

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dapat dikenai penggantian kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet III, 2016), h. 88-90

Alasannya adalah bahwa Alquran hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebut-nyebut penggantian kerugian.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah (masyarakat) dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah (masyarakat) sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.

Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, disamping ia dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila ia tidak mampu maka ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian.

b. Hukuman Potong Tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Maidah/5: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”²³

Hukuman potong tangan menerapkan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri, kecuali menurut Syi’ah Zaidiyah. Menurut mereka, hukuman potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban(pemilik barang).

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman *ta’zir* dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenakan hukuman *ta’zir* dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat.²⁴

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Cet. I; Depok Sabiq, 2012), h.78.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet III, 2016), h. 90-91

Pendapat jumhur ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari abu Hurairah, Nabi bersabda dalam kaitan dengan hukuman bagi pencuri

إِنْسَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْسَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْسَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْسَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْسَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ

Artinya:

Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan).²⁵



²⁵ Muhammad ibn Isma'il Al-kahlani, *Subul As-Salam Juz IV*, (Maktabah Musthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1960), h. 23

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dengan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sah) mengenai dunia alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut.¹

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif lapangan, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif yang mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.²

Dengan dasar tersebut, penggunaan metode penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang Peran Babinkamtibmas dalam mencegah

¹Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. 1.,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 8.

²Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)* (Cet. I; Malang: Intelegensia Media, 2015), h.122.

terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Camba Kab. Maros).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi pada Polsek Camba kec. Camba Kab Maros, Sulawesi Selatan dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. peran babinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian di kecamatan camba
2. Pendekatan Normatif Syar'i pendekatan ini berdasarkan pada hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur' an dan Hadis serta pendapat para ulama

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data penelitian dari Polsek Camba Kec.Camba Kab Maros dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti; interview yaitu berarti kegiatan langsung

kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan. Informan adalah orang yang bersedia memberikan informasi tentang kondisi, situasi dan latar belakang penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah anggota babinkamtibmas polsek camba kecamatan camba.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya

D. Metode pengumpulan data

1. Obsevasi

Dalam teknik ini, pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial maupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe, dan tujuan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan *Interview Guide*

(panduan wawancara).³ Untuk mendapatkan informasi lebih, penelitian ini melakukan wawancara petugas Babinkamtibmas di Kecamatan Camba.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Perlu diketahui, yang dimaksud dokumentasi tidak hanya berupa foto saja. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴

E. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian.

Instrumen Penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Bagian ini menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian⁵. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

- a) Peneliti sebagai instrumen pertama yang melakukan penelitian di Polsek Camba
- b) Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan

³Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 193

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet. XXIII; Bandung: PT. Alfabeta, 2016), h.240.

⁵Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Cet. I; Makassar; Alauddin Press, 2013), h. 17.

- c) Handphone atau camera untuk dokumentasi
- d) Alat tulis dan buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang di anggap penting.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan

Teknik Pengolahan merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan, sehingga siap digunakan untuk menganalisis. Adapun termasuk dalam teknik pengolahan, yaitu:

- a. Seleksi Data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
- b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan.
- c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
- d. Penyusunan Data, yaitu data yang disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.⁶ Setelah pengolahan data, peneliti kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang dilakukan dengan

⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* Ed.2, Cet. Ke-24; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 40.

menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan.

3. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan, dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi:

a. Uji Kredibilitas

Tingkat ukuran suatu kebenaran atas data yang telah dikumpulkan dan menyamakan data antara konsep penelitian dengan hasil penelitian. Selain itu, dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan memberchek.⁷

b. Teknik Analisis

Suatu teknik pengujian secara sistematis untuk mencari pola terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Hal ini bersifat induktif, dimana suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁸

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, h. 240.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, h. 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kecamatan Camba

Kecamatan Camba adalah salah satu kecamatan dan sekaligus sebagai kota kecamatan yang ada di kabupaten Maros. berada 78 KM dari kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak dibagian Utara dari Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 145.36 km atau 0,67% dari luas Wilayah Kabupaten Maros, Yang secara kewilayahan kecamatan camba terletak di dataran sedang sekitar 340 Km dari permukaan laut. Ibu kota Kecamatan ini, di kelilingi oleh Kawasan pegunungan yang hijau, deretan gunung macconggi, sehingga memiliki iklim yang sejuk dan curah hujan yang tinggi.

Kecamatan Camba terletak diantara $5^{\circ}01'04.0''$ LS dan $119^{\circ}34'35.0''$ BT dengan batas-batas yakni :

- a. Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Mallawa
- b. Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Pangkep
- c. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Bone
- d. Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bone

Kecamatan Camba terdiri dari 2 kelurahan dan 6 Desa Yaitu Kelurahan Cempniga, Kelurahan Mario Pulana, Desa Patanyamang, Desa Pattiro deceng, Desa Benteng, Desa Timpuseng, Desa Cenrana, Desa Sawaru. 7 diantara desa dan kelurahan adalah daerah pertanian dan perkebunan yaitu: Kelurahan Mario Pulana, Desa Patanyamang, Desa pattiro Deceng, Desa Benteng, Desa timpuseng, Desa Cenrana, Desa sawaru dan Kelurahan cempniga menjadi pusat

perekonomian masyarakat. Kecamatan camba pun mempunyai potensi Alam yang luar biasa. Hanya saja sampai saat ini pemerintah setempat belum pernah mencoba memaksimalkan potensi tersebut. Beberapa lokasi yang dapat menjadi potensi wisata adalah air terjun Maddenge yang terletak di desa Pattiro deceng dan tempat wisata dan rekreasi yang paling banyak di kunjungi adalah Tanah tenggah yang letaknya di Desa cenrana.

Dari 8 desa dan kelurahan di kecamatan camba, kondisi infrastruktur jalan sudah mengalami perubahan dari tahun ke tahun, pengecoran di desa sudah mencapai 80 persen sehingga jalan untuk menuju ke desa tersebut mudah di akses.

2. Kondisi Demografi Polsek Camba

Penelitian dilaksanakan di Polsek Camba, jalan Poros Camba Maros Kecamatan Camba Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Polsek Camba sendiri memilih wilayah hukum luas 145.36 km.

Luas wilayah Hukum Polsek Camba sekitar 145.36 km yang dioleh penduduk sebanyak 14.304 jiwa yang terbagi atas laki-laki 6.994 jiwa dan perempuan 7.310. Wilayah hukum dari Polsek Camba, terdiri dari 2 kelurahan dan 6 desa, yaitu :

- a. Kelurahan Cempaniga
- b. Kelurahan Mario Pulana
- c. Desa Timpuseng
- d. Desa Cenrana
- e. Desa Sawaru
- f. Desa Patanyamang
- g. Desa Pattiro Deceng

h. Desa Benteng

Adapun batas-batas wilayah kecamatan Camba adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Mallawa
- b. Sebelah Timur berbatasan kabupataen Pangkep
- c. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Bone
- d. Sebelah Barat berbatasan kabupaten Bone

3. Struktur Organisasi Polsek Camba

Negara sebagai suatu organisasi adalah suatu struktur jabatan-jabatan. Perkembangan arti Negara menurut Kranenburg pada akhirnya memiliki pengertian” fungsi-fungsi umum yang teratur dan alat-alat yang membentangkan diri diatas jabatan-jabatan. Dua hal utama yang ada dalam berbagai pengertian Negara yang dikemukakan para ahli adalah organisasi dan kekuasaan, sebuah organisasi, Negara memiliki, alat-alat kelengkapan yang disebut dengan organ Negara. Organ –organ inilah yang menjalankan kekuasaan Negara secara terorganisir untuk mencapai tujuan Negara.

Polisi sebagai aparat pemerintahan, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintahan. Dari segi bahasa organisasi kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melakukan tugas-tugas kepolisian. Agar organisasi tersebut terkordinir dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembang, bentuk dan struktur ditentukan oleh visi pemerintahan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya.

Diseluruh dunia organisasi polisi itu berbeda-beda ada yang membawah pada Departemen dalam negeri, ada yang membawah pada Departemen

Kehakiman, ada yang dibawah kendali perdana menteri, wakil presiden, dikendalikan oleh presiden itu sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.

Dalam Kepolisian terdapat beberapa Satuan. Diantaranya ialah sat intelkam, sat reskim, sat babinkamtibmas, sat sabhara, sat lantas dan sebagainya tempat penulis meneliti ialah di bagian babinkamtibmas semua masalah-masalah kriminal sesuai dengan judul penulis.

Berikut struktut organisasi Polsek Camba:

KAPOLSEK
A. ALAMSYAH S. S.H

WAKAPOLSEK
IPTU SAHABUDDIN

KANIT BINMAS
AIPTU AMRAN TAKDIR

Struktur Babinkamtibmas di Kecamatan Camba

Kel. Cempaniga	Desa Pattiro Deceng
Bripka Muhammadong	Bripka Muhammadong
Kel. Mario Pulana	Desa Patanyamang
Brigpol Herman	Brigpol Herman

Desa Sawaru
Brigpol Fakhruddin
Desa Cenrana
Bripka Akbar Sirajuddin

Desa Benteng
Brigpol Fakhruddin
Desa Timpuseng
Bripka Akbar Sirajuddin

Sumber: Polsek Camba

Bisa dilihat pada Struktur Organisasi Polsek Camba, yang dikepalai oleh Pak A. Alamsyah S S.H pada bagian Babinkamtibmas menangani permasalahan yang tindak pidana pencurian yang ada di desa dan kelurahan dikecamatan Camba.

Luas wilayah hukum Polsek Camba sekitar 145.36 km, yang didiami oleh penduduk sebanyak 14,304 jiwa dari 2 Kelurahan dan 6 Desa. Rinciannya yaitu sebagai berikut:

No	Kelurahan/Desa	Jumlah penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Cempaniga	961	1,192	2,153
2	Mario Pulana	692	726	1,418
3	Timpuseng	870	889	1,769
4	Cenrana	928	955	1,883
5	Sawaru	1,104	1,063	2,167
6	Patanyamang	726	790	1,516
7	Pattiro Deceng	1,058	1,031	2,089
8	Benteng	658	655	1,313

Sumber: Kantor Kecamatan Camba Kabupaten Maros Tahun 2017

Dapat dilihat tabel diatas bahwa wilayah kecamatan Camba terdiri dari 8 desa dan kelurahan. Didaerah ini sering terjadi tindak pidana pencurian, maka dapat dapat dilihat perkembangan dari jenis-jenis kasus pencurian yang terjadi

diKecamatan Camba . data tersebut diperoleh dari tempat penelitian penulis di polsek camba.

Sesuai hasil Penelitian yang dilakukan di polsek camba, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa jenis pencurian yang ada di wilayah kecamatan camba. Untuk lebih jelasnya, penulis memaparkannya dalam bentuk tabel.

Adapun pencurian yang terjadi di Kecamatan Camba Pada tahun 2017

No	Jenis Pencurian	Jumlah
1.	Pencurian Hewan	6
2.	Pencurian Hp	2
3.	Pencurian Curan Mor	3
4.	Pencurian Aki	1

Sumber: Bripka Akbar Sirajuddin (Babinkamtibmas Polsek Camba)

Tindak pidana pencurian berdasarkan tabel diatas, telah selesai atau dengan kata lain pelaku tindak pidana Pencurian yang dilaporkan pada tahun 2017 pelakunya telah berhasil ditemukan oleh pihak babinkamtibmas dan telah diselesaikan secara hukum yang berlaku. Pada tabel diatas bisa dilihat dengan jelas bahwa pada polsek camba jenis pencurian dibedakan menjadi empat, yakni pencurian Hewan, pencurian hp, pencurian Curan mor, dan pencurian Aki. Jumlah laporan pada tahun 2017 pencurian Hewan ada 6 yang dilaporkan dan berhasil di selesaikan pada tahun 2017. Pada pencurian hp pelaku ditangkap dan di selesaikan dengan prosudur hukum, dan pencurian Curan Mor dan aki pun dengan kasus nya pun terselesaikan di tingkat polsek.

Berdasarkan pada tabel data jenis pencurian pada Polsek Camba pada Tahun 2017 dapat di simpulkan bahwa jumlah laporan yang masuk semua kasus tindak pidana pencurian dapat terselesaikan dengan tuntas. Hasil Wawancara dari

Bripka Akbar Sirajuddin sirajuddin selaku Babinkamtibmas mengatakan bahwa, pada umumnya semua kasus dapat terselesaikan karna adanya laporan dari warga sehingga dapat diselidiki kemudian pelaku ditangkap.

Terlihat bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi di kecamatan camba tidak terlalu banyak kasus pencurian. Dari hasil wawancara Bripka Muhammad Akbar Sirajuddin selaku Babinkamtibas di Kecamatan Camba mengatakan bahwa faktor utama atau yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pencurian rata-rata ialah faktor Ekonomi. Hampir semua jawaban dari pelaku mengatakan dengan alasan faktor Ekonomi.

Pelaku mengambil barang curian tersebut untuk dimiliki kemudian di jual maka digunakanlah uang tersebut untuk keperluan si pelaku. Babinkamtibmas melakukan tugasnya dengan cara patroli, penyuluhan dengan cara sambang ke desa atau kelurahan dikecamatan camba dan giat siskamling yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut merupakan upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak babinkamtibmas.¹

Peran babinkamtibmas sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Karena masyarakat menganggap Babinkamtibmas sebagai pelindung dari kejahatan-kejahatan yang terjadi.

¹ Bripka Muhammadong, Babinkamtibmas Kecamatan Camba, *wawancara*, Camba, 5 September 2017

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba.

1. Faktor Pendukung

Terkait dengan segala upaya pencegahan tindak pidana pencurian di Kecamatan Camba, ada beberapa factor yang menjadi acuan untuk lebih meningkatkan dan memberdayakan supaya lebih maksimal. Adapun faktor pendukung dalam pencegahan tindak pidana pencurian di kecamatan Camba, dapat dibagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Pendukung internal

Kerja sama Babinkamtibmas dengan pemerintah Kecamatan, Desa dan kelurahan Dalam struktur kerja Babinkamtibmas melibatkan para pemerintah setempat meminimalisir pencurian, seperti Camat, Sekcam, Dprd, Lurah dan Kepala Desa dan tokoh Masyarakat. pelaksanaan sosialisasi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh tim babinkamtibmas untuk meminimalisir pencurian di Kecamatan Camba.

b. Faktor Pendukung Eksternal

Adapun faktor pendukung eksternal dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba masyarakat setempat ikut serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar kondisi wilayah menjadi aman. Dengan cara seperti ini akan lebih mempermudah pihak Babinkamtibmas untuk melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana Pencurian di Kecamatan Camba.

Setelah Babinkamtibmas membentuk Siskamling di kecamatan Camba juga sangat membantu mengurangi tindak pidana pencurian. Setiap malam dilakukan ronda malam untuk meminimalisir Tindak Pidana Pencurian.

2. Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan upaya pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba masih menghadapi hambatan-hambatan yang berarti, sehingga mengakibatkan upaya pencegahan yang dilakukan tidak berjalan secara maksimal

Adapun beberapa hambatan Babinkamtibmas dalam melakukan upaya pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba, Faktor hambatan tersebut antara lain:

a. Hambatan Internal

Hambatan Internal adalah hambatan yang berasal dari dalam lembaga Babinkamtibmas dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba yang menyebabkan kurang maksimalnya upaya tersebut, adapun hambatan internal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan Dana

Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana pencurian di Kecamatan Camba pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk melaksanakan sosialisasi, patroli dan kunjungan ke setiap desa di Kecamatan Camba oleh Babinkamtibmas.

2. Sarana dan prasarana belum ada

Dalam meningkatkan kinerja Babinkamtibmas semestinya harus didukung oleh ketersediannya rumah dinas, perangkat operasional seperti motor dan lain-lain.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan dari luar lembaga babinkamtibmas yang kurang mendukung atau bahkan menghambat upaya pencegahan tindak pidana pencurian di kecamatan camba.

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Babinkamtibmas kepada masyarakat yang ada di Kelurahan dan Desa yang berada di Kecamatan Camba.
2. Parisipasi dari masyarakat, pihak Babinkamtibmas telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus pencurian khususnya di Kecamatan Camba. Namun hal ini dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri, bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut, apakah dia mau mendengar atau tidak. Menurut penulis, setiap kegiatan harus bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa saja yang ingin dilakukan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan semuanya kepada pihak Babinkamtibmas, akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana pencurian, sebab laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak Babinkamtibmas.

Dari beberapa penjelasan hambatan pencegahan tindak pidana pencurian di kecamatan camba , maka upaya yang dilakukan oleh babinkamtibmas untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas adalah sebagai berikut antara lain :

a) Upaya mengatasi hambatan internal

1. Upaya mengatasi kendala berupa keterbatasan dana yang dihadapi oleh Babinkamtibmas dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba dengan menggunakan dana secara efektif dan efisien.
2. Untuk mengatasi kendala berupa sarana dan prasarana maka Babinkamtibmas di berikan tempat yang terdekat dari Polsek Camba untuk menjalankan tugas

b) Upaya mengatasi hambatan eksternal

1. menerapkan sosialisasi ke seluruh kelurahan dan desa yang ada di kecamatan camba.
2. Menerapkan sosialisasi secara merata di seluruh elemen masyarakat.²

C. Pandangan Hukum Islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan peran Babinkamtibmas tentang Tindak Pidana Pencurian

Didalam hukum islam, Babinkamtibmas (syurthah). Pada masa Nabi Yusuf, sudah dikenal adanya syurtah atau seseorang yang mengadili suatu tindakan. Hal ini dapat dilihat pada Firman Allah dalam Q.S Yusuf/13: 76

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ
كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

Terjemahnya:

“Maka mulailah dia (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan (piala raja) itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana unruk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki; dan diatas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.”³

Dalam surah itu di jelaskan tentang bagaimana sikap aparat Negara yang di pimpin oleh yusuf terkait kejadian pencurian barang Negara. Babinkamtibmas memiliki tugas untuk menjaga keamanan di dalam suatu Negara.

² Bripka Akbar sirajuddin, Babinkamtibmas Kecamatan Camba, wawancara, Camba, 10 Oktober 2017

³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Cet I: Depok Sabiq 2012), h. 171.

Dalam Negara Islam, babinkamtibmas ada dua macam yaitu polisi militer dan polisi di bawah otoritas Khalifah. Yang di perbolehkan menjadi seorang polisi adalah pria dan wanita yang sudah baligh dan warga Negara khilafah. Dalam menjalankan tugasnya, seorang polisi mempunyai identitas khusus serta seragam sendiri untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman negaranya. Kepala kepolisian hendaklah memiliki kecakapan dan kuat, tidak mudah lupa dan pengawal pribadi hendaklah yang sudah berumur serta dapat menjaga kesucian tidak memiliki catatan kriminal.⁴

Didalam hukum islam, penjara sama halnya dengan ta'zir. Ta'zir yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain.⁵ Kaitan babinkamtibmas dengan ta'zir sangat erat, karena selain mempunyai tujuan yang sama dengan cara penetapan hukumannya oleh Ulil Amri, babinkamtibmas merupakan kelanjutan dari Ta'zir.

Hal ini sejalan dengan Babinkamtibmas yang bertujuan memberikan arahan terhadap masyarakat, sehingga penjara bisa di kategorikan dalam Ta'zir kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah hudud atau qishash diyat. Hal ini bila menurut pertimbangan pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Disamping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi jarimah hudud dan qishash diyat yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena

⁴*Profesi Polisi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian*, dari mykindo.blogspot.co.id/ diakses pada tanggal 19 November 2017.

⁵Djazuli, *Fiqh Jinayah, (Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 163.

adanya syubhat baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini keberadaan sanksi ta'zir menempati hukuman pengganti hudud atau diyat.⁶

Jenis hukuman yang termasuk Jarimah Ta'zir antar lain adalah hukuman penjara, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata. Dalam Hukum islam ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan manusia. Menurut imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat dilakukan atau dijatuhi oleh Hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan kedalam penjara , lalu mengulangi untuk mencuri ketika sudah dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.⁷

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyariatkan dalam hukum islam berdasarkan dalil Qur'an, sunnah, dan Ijma, sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan lebih patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara ini dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi, dizaman sekarang ini pidana penjara seolah menjadi kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya penjara.⁸ Berikut ini dasar diadakannya pidana penjara dalam Islam terdapat dalam QS Al-Maidah/5 : 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 143.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet: II, 2009), h. 10.

⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 143.

Terjemahnya:

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang berat.”⁹

Firman-Nya: *dibuang dari negeri tempat tinggalnya*, dipahami oleh sementara ulama dalam arti ditempatkan di satu lokasi yang jauh dan terpencil, lagi tidak mudah meninggalkannya, jika di Indonesia misalnya Nusakambangan. Imam Abu Hanifah memahaminya dalam arti dipenjarakan. Ada juga yang menekankan pada substansi hukuman ini yaitu bahwa hukuman tersebut bertujuan menghalangi pelaku kejahatan mengganggu masyarakat.¹⁰

Para Fuqaha Mazhab Abu Hanifah, Syafi’I dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman itu disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Yaitu, barang siapa yang membunuh tetapi tidak mengambil hartanya, maka ia dijatuhi hukuman bunuh. Barang siapa yang mengambil harta tetapi tidak membunuh, maka ia di potong tangannya. Barangsiapa yang mengambil harta dan membunuh, maka ia dihukum bunuh dan salib. Dan, barang siapa yang menakut-nakuti orang lewat tanpa membunuh dan tidak mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman pengasingan.¹¹

Menurut Imam Malik, orang yang melakukan kejahatan itu apabila membunuh, maka ia harus dihukum bunuh. Jika ia merampas harta dan tidak membunuh, maka tidak boleh memilih hukuman dengan mengasingkan. Adapun

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahnya, (Cet, I: Depok,sabiq, 2012), h. 113

¹⁰M . Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: *pesan, kesan dan keserasian Al-quran*,(Jakarta: Lentera hati, Volume 3, 2002), h. 85-86

¹¹Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Quran Dibawah Naungan Al-Quran Jilid 3,(Depok:Gema Insani, cet III, 2008), h. 215

jika ia hanya menakut-nakuti orang di jalan saja, maka diberi pilihan untuk membunuh, menyalib, memotong tangan, atau mengasingkannya.¹²

Para fuqaha juga berbeda pendapat tentang makna “dibuang dari negeri (tempat kediamannya).” Apakah dibuang dari wilayah tempat ia melakukan kejahatan itu? Ataukah dihilangkan kemerdekaannya di negeri itu dalam arti di penjarakan ? atau, disingkirkan dari seluruh permukaan bumi dalam arti dibubuh? Beberapa fuqaha memilih membuangnya dari negeri tempat ia melakukan kejahatan itu ke tempat terpencil yang disana dia dapat merasakan keterasingan, keterusiran, dan kelemahan, sebagai balasan atas tindakannya mengusir, menakut-nakuti, dan menganiaya orang lain dari dengan kekuatannya. Didalam pengasingan ini, dia tidak mampu melakukan kejahatan lagi, karena semangatnya sudah lemah atau karena terasing dari kelompoknya.¹³

Pada masa Rasulullah, ta'zir atau pidan penjara dilakukan dengan cara mengasingkan dari masyarakat ke suatu tempat yang tidak ada penghuninya. Sedangkan pada masa sekarang, yaitu dengan mengasingkan terpidana dari masyarakat ke Penjara. Walaupun prakteknya sama antara masa Rasulullah dengan masa sekarang, namun efek jera yang diberikan lebih baik pada masa Rasulullah.¹⁴

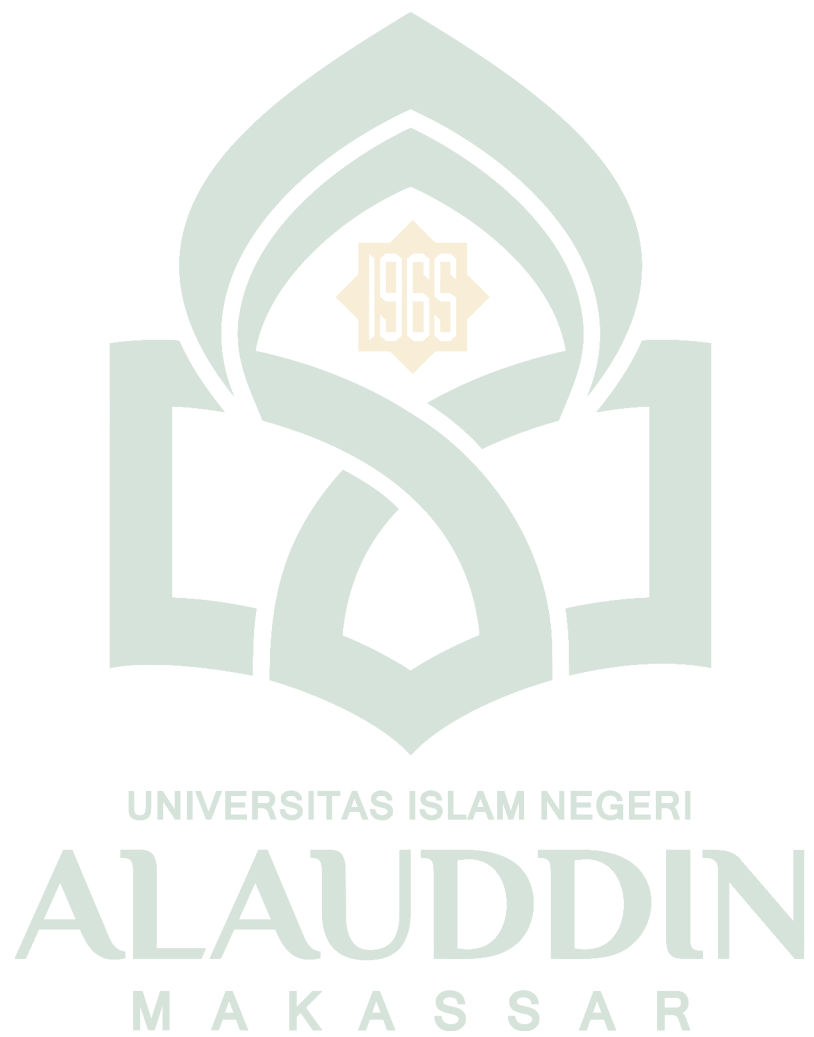
Salah satu tujuan dari menjatuhkan hukuman dalam Islam untuk mendidik para pelaku Jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan. Perkap no 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat telah sesuai dengan hukum Islam yang

¹²Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Quran Dibawah Naungan Al-Quran Jilid 3,(Depok:Gema Insani, cet III, 2008), h. 215

¹³ Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Quran, h. 216

¹⁴Nasir Cholis, *Fikh Jinayat*,(Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 126

memberikan rasa agar tidak terjadi tindak pidana pencurian dan bertujuan untuk menjaga keamanan setempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polsek Camba kecamatan Camba dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang peran babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di kecamatan Camba dalam perspektif Hukum Islam yaitu:

1. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di Kecamatan Camba, pihak Babinkamtibmas mendapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, meliputi: Faktor pendukung yaitu terjalinnya kerjasama yang baik antara Babinkamtibmas dan perangkat pemerintahan Kecamatan Camba untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian di Kecamatan Camba, dan peran serta masyarakat setempat yang ikut menjaga keamanan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian di Kecamatan Camba. Faktor Penghambat yaitu keterbatasan dana serta kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian di Kecamatan Camba, dan Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Babinkamtibmas kepada masyarakat yang ada di Kelurahan dan Desa yang berada di Kecamatan Camba.
2. Peran Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang berdasarkan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat adalah sejalan dengan konsep Hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat setempat. Hanya saja prosesnya yang berbeda, di zaman Rasulullah, sahabat, dan sekarang. Begitupun peran Babinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di Kecamatan Camba tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Babinkamtibmas di Kecamatan Camba harus menyiapkan strategi untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Camba. Termasuk menerapkan hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana pencurian . Agar keamanan di Kecamatan Camba dapat berjalan efektif, sehingga Babinkamtibmas dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan.
2. Diperlukan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayah Hukum Kecamatan Camba agar tercipta masyarakat yang aman dan damai, serta terhindar dari tindak pidana pencurian yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2007)
- Abd Al-Qadir Audah, al-tasyri' Al-Jinai Al-Islami, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun,
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet III, 2016)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Ed, 1., Cet , - Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002)
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1985)
- Chazawi. Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Dillah, Philips, Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. V;Bandung: Alfabeta, 2015).
- Djazuli, *Fiqih Jinayah, (Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Efendi. Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*,(Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012)
- Fiqihsiyasah dan ruanglingkupnya, pengertian siyasah dan siyasah syar'iiyyah, kedudukan fiqih siyasah,*
- Ismu gunadi dan Junedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Cet. I:Jakarta:Kencana , 2014)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Cet. I; Depok Sabiq, 2012)
- Kementrian Agama, Syaamil Al-Quran, (Sygma, 2012)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-quran*,(Jakarta: Lentera hati, Volume 3, 2002),
- Muhammad ibn Isma'il Al-kahlani, *Subul As-Salam Juz IV*, (Maktabah Musthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1960)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Cet. XX; Jakarta: Rajawali Pers, 2014),

Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. 1.,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20014).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987).

Nazir, Moh, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

Nasir Cholis, *Fikh Jinayat*,(Pekanbaru: Suska Press, 2008),

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*(Jakarta 1984)

Peraturan kapolri No. 1 Tahun 2009 *Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*. Pasal 3

Profesi Polisi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian, dari mykindo.blogspot.co.id/

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009
Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Purnomo. Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*,(Bandung: Ghalia Indonesia, 1985)

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)

Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015* tentang Pemolisian Masyarakat Bagian Kedua

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* Ed.2, Cet. Ke-24; Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Laksbang, Surabaya, 2009)

Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)* (Cet. I; Malang: Intelegensia Media, 2015).

Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*(Cet. XXIII; Bandung: PT. Alfabeta, 2016).

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran* Dibawah Naungan Al-Quran Jilid 3,(Depok:Gema Insani, cet III, 2008)

Surodibroto dan sunarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (cet 17, Jakarta Rajawali Pers, 2014).

Suryabrata, Sumadi *Metodologi Penelitian*(Ed.2, Cet. Ke-24; Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Cet. I; Makassar; Alauddin Press, 2013),

Yuslim, *Hukum Acara Perdilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet: II, 2009)

INTERNET

Pencurian,” [http://id. Wikipedia.org/wiki/](http://id.wikipedia.org/wiki/), akses tanggal 10 juni 2017. Pukul 20.00

KBBI. Web. Id/curi di akses tanggal 17 November 2017.

Profesi Polisi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian, dari mykindo.blogspot.co.id/ diakses pada tanggal 19 November 2017

ALAUDDIN
M A K A S S A R



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 12797/S.01P/P2T/08/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Maros

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syarifah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/2278/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD AKBAR HIDAYAT
Nomor Pokok : 10300113229
Program Studi : HPK
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PERAN KAMTIBMAS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KECAMATAN CAMBA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI KECAMATAN CAMBA KAB. MAROS) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 23 Agustus s/d 23 September 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 23 Agustus 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Syarifah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 23-08-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmduiselsprov.go.id> Email : p2t_provisulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Jendral Sudirman Kompleks Kantor Bupati Kab. Maros Kode Pos 90516
e-mail : bkppm@maroskab.go.id Web : kesbangpol.maroskab.go.id

Maros, 04 September 2017

Nomor : 070 /661/KesbangPol
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth. Polsek Camba Kab. Maros

Di,-
Maros

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 12797/S.01P/P2T/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017 perihal tersebut diatas, Mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD AKBAR HIDAYAT**
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 06 November 1994
Alamat / Hp : Jl. Karunrung Raya 2 No. 10
Jenis Kelamin : Laki - laki
No.KTP / SIM : 7309020611920004
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Program Studi : HPK
No.Pokok : 10300113229

Bermaksud melakukan izin penelitian /Pengambilan Data di daerah /kantor Saudara dalam rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

“PERAN BABINKAMTIBMAS DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PERENCURIAN DI KECAMATAN CAMBA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN CAMBA KAB. MAROS)”

Yang di Laksanakan : Tgl 04 September s/d 30 September 2017
Pengikut : -

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut melaporkan diri kepada Bupati Maros Cq.Kepala Badan Kesbangpol Kab.Maros;
2. Penelitian /Pengambilan Data dimaksud tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah;
3. Mentaati semua ketentuan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) rangkap Draft Proposal Penelitian /Pengambilan Data di maksud kepada Bupati Maros Cq.Kepala Badan Kesbangpol Kab.Maros;
5. Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut ditanggung oleh bersangkutan;
6. Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Badan Kesbangpol selambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Demikian Rekomendasi Penelitian/Pengambilan Data ini untuk dipergunakan sebagaimana Mestinya.

a.n. KEPALA
Sekertaris



MUHYUSUF SE
Pangkat : Pembina Tk I
Nip : 19601231 199403 1 079

Tembusan Kepada Yth

1. Bupati Maros (sebagai laporan) ;
2. Kepala Inspektorat Kab.Maros di Maros ;
3. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Maros di Maros ;
4. Dekan Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar ;
5. Arsip.

INSTRUMEN PENELITIAN

PERAN BABINKAMTIBMAS DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KECAMATAN CAMBA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM(STUDY KASUS DI KEC.CAMBA KAB MAROS)

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PETUGAS BABINKAMTIBMAS

C. IDENTITAS INFORMAN

1. NAMA :
2. UMUR :
3. JENIS KELAMIN :
4. JABATAN :

D. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang di Maksud Babinkamtibmas ?
2. Apa Fungsi dan Tujuan dari Babinkamtibmas ?
3. Apa saja tugas dan Wewenang Babinkamtibmas ?
4. Sudah Berapa Tahun Babinkamtibmas terbentuk di Kec. Camba ?
5. Alasan terbentuknya Babinkamtibmas ?
6. Tingkat Kejahatan Sebelum di bentuknya Babinkamtibmas Dan Sesudah Di bentuk?
7. Kasus Apa Yang pernah di tangani Babinkamtibmas ?
8. Siapa Yang bertanggung jawab dalam mencegah Tindak pidana pencurian ? dan seperti apa bentuk Pertanggungjawabnya ?
9. Cara penanggulangan tindak pidana kejahatan yang dilakukan babinkamtibmas ?
10. Faktor apa yang mendukung dan menghambat Babinkamtibmas dalam menanggulangi kejahatan ?
11. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang di peroleh ?
12. Peran babinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian di kec. Camba ?
13. Apakah Masyarakat ikut berperan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian di kec. Camba ?
14. Kalau berperan, seperti apa peran masyarakat tersebut ?
15. Apakah ada sosialisasi yang di lakukan babinkamtibmas dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana dan seperti apa bentuk sosialisasinya ?

ALA UDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor 2145 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Muhammad Akbar Hidayat
NIM : 10300113229
Jurusan : Hukum Pidana & Ketatanegaraan (HPK)
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Desember 2017
Perihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Peran Babinkamtibmas Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Camba (Perspektif Hukum Islam)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.Si
Penguji I : Dr. Alimuddin, M.Ag
Penguji II : Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag
Pelaksana : 1. Drs. Ikshan Zainuddin, M.M
2. Andriyanto, S.E
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 4 Desember 2017
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa
(Sebagai Laporan)



ALAUDDIN
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : B-4750/SH.01/PP.00.9/12/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN UJIAN MUNAQASYAH

Samata, 4 Desember 2017

Kepada.

- Yth. 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
2. Dra. Nila Sastrawati, M.Si (Sekertaris)
3. Dr. Alimuddin, M.Ag (Penguji I)
4. Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag (Penguji II)
5. Dr. Sohras, M.Ag (Pembimbing I)
6. Irfan, S.Ag., M.Ag (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di-
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Muhammad Akbar Hidayat
N I M : 10300113229
Jurusan : Hukum Pidana & Ketatanegaraan (HPK)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) Untuk Menghadiri Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Desember 2017
Buka Sidang : 08.30 WITA
Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016-199003-1-003

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa
(Sebagai Laporan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

FOTO DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Akbar Hidayat, lahir di Ujung Pandang (sekarang Makassar), pada tanggal 06 November 1994. Merupakan anak kedua dari lima bersaudara pasangan Bapak Drs. Nasruddin dan Ibu Hasdawati. Jenjang pendidikan yang ditempuh mulai dari SDN 54 Patanyamang Kec. Camba Kab. Maros lulus pada Tahun 2007,

Kemudian melanjutkan sekolahnya di SMPN 21 Makassar lulus pada tahun 2010, lalu selanjutnya di SMAN 2 Camba Maros Kec. Camba Kab. Maros lulus pada tahun 2013.

Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan SMAN 2 Camba Maros tahun 2013, pada tahun yang sama, penulis kemudian memilih melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang berada di kota Makassar yakni Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Penulis mengambil jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK) di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan telah menimba ilmu pada perguruan tinggi tersebut sebagai bekal penulis dalam mengarungi samudra kehidupan dimasa yang akan datang. Pengalaman demi pengalaman banyak diperoleh penulis selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis berharap apa yang didapatkan berupa ilmu pengetahuan dapat penulis amalkan di dunia dan mendapat balasan rahmat dari Allah SWT. Dikemudian hari, serta dapat membahagiakan kedua orang tua yang selalu mendo'akan dan memberikan segala dukungan yang tiada hentinya.